



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUNADI**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **105780**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah Seluas 2945 m2 di KENDAL, WARISAN Rp. 149.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/60 m2 di KENDAL, WARISAN Rp. 89.500.000
3. Tanah Seluas 175 m2 di KENDAL, WARISAN Rp. 69.789.000

Rp. 308.789.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SOUL GT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

Rp. 152.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 690.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 14.074.800

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 476.053.800

III. HUTANG

Rp. 279.835.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 196.218.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.